

Harta dan Kuasa dalam Masa Orde Baru

Oleh J.A.C. Mackie

Pertikaian pendapat yang tidak kurang sengitnya adalah tentang apakah ada kelas menengah di Indonesia. Ada aliran yang mengatakan ada golongan itu, tetapi J.A.C. Mackie secara gamblang mengatakan tidak ada kelas menengah itu. Golongan burjuasi-inti-intinya kelas menengah dalam arti sebenarnya—tidak hidup. Kapitalisme dalam bentuk yang murni tidak ada. Semangat kompetisi tidak dihargai. Karena itu pertumbuhan kelas menengah hampir tidak dapat diharapkan dalam suatu masyarakat politik di mana patrimonialisme masih sangat kuat pengaruhnya, di mana politik sebenarnya masih menjadi panglima.

Sejak tahun-tahun pertama kemerdekaan Indonesia, ilmu-ilmu sosial tergagah oleh sangat lemahnya, malah sudah hampir mendekati taraf tidak adanya sama sekali pertama, suatu kelas menengah atau "burjuasi" dan, kedua, kelompok tuan tanah besar atau bahkan petani kaya. Keadaannya sudah agak berubah dalam masa Orde Baru, tetapi menurut hemat saya, tidak dalam arti sebenarnya sebagaimana dimaksudkan oleh analisa-analisa tentang pembentukan kelas di Indonesia masa kini. Tujuan tulisan saya adalah untuk mengusulkan suatu cara bagaimana kita bisa melihat sejauh mana dan mana batas-batas perubahan yang kini sedang berlangsung di dalam beberapa sektor utama dalam kehidupan sosial ekonomi yang ada hubungannya dengan teka-teki ini.

Sisi lain dalam mata uang yang sama adalah kesulitan untuk menentukan siapa sebenarnya yang merupakan elite daerah di tingkat provinsi atau kabupaten di Indonesia dan manakah dasar posisinya yang tinggi itu. Di Jakarta, tingginya kedudukan birokrasi, para pimpinan di pemerintahan dan angkatan bersenjata—juga dalam hal ini para pimpinan partai politik, dalam masa Sukarno—para pejabat pimpinan pusat perserikatan dagang yang besar, bank, perkebunan, dan lain-lain, memberikan sebagian besar

jawaban atas pertanyaan itu.¹ Tetapi di daerah, pejabat-pejabat jenis itu sering kali digeser dari saat ke saat, dengan akibat secara nisbi hanya sedikit yang berpengaruh secara politik di tingkat daerah (kecuali sejauh pos yang dipegangnya untuk sementara memberikannya kekuasaan dan pengaruh); atau mereka begitu kuat terpaut dengan daerahnya dibandingkan dengan hirarki organisatoris di mana dia berada. Hampir tidak dapat kita melihat keluarga di daerah dengan harta kekayaan yang bertahan lama atau dalam jumlah yang luar biasa besarnya, sebagaimana di negara-negara lain; juga tidak ada pemilik perkebunan kaya yang bisa segera tampak atau pemilik tanah besar yang berkuasa besar di daerah. Demi-

1 Tidak lama setelah nasionalisasi semua perusahaan Belanda di Indonesia pada tahun 1957-1958—perkebunan, bank, perusahaan dagang dan lain-lain—saya tertarik kepada pertanyaan berapa jauh manajer baru di daerah yang memegang perusahaan negara diidentifikasi dengan panglima militer setempat dan pamong praja sebagai inti elite daerah yang baru; pada waktu itu ada sedikit saja tanda-tanda adanya kesamaan pandangan dan sikap di kalangan kelompok ini. Lihat tulisan saya "Indonesia's Government Estates and their Masters", *Pacific Affairs*, Vol. 34, no. 4, Musim Dingin 1961-1962, hal. 354-360. Situasinya agaknya tidak berubah terlalu radikal sejak itu.

kianlah pada hakekatnya hanya elite birokratik yang bisa kita bayangkan ada di Indonesia; bukan elite berharta, sebagaimana dalam masa Sukarno, elite dengan basis partai politik. Mengenai kelas menengah Indonesia yang sudah muncul sejak tiga dasawarsa terakhir, maka yang ada adalah pertamanya kelas menengah bergaji dan kelas menengah profesional, dan bukan kelas menengah wiraswasta atau kelas menengah hartawan.² (Bahkan unsur rentenir secara menyolok tidak ada artinya dalam gambaran secara keseluruhan—dibandingkan dengan, misalnya, India atau Filipina)—meskipun ada perubahan sedikit dalam hal ini sebagaimana akan kita lihat di bawah nanti.

Karena pengusaha Cina jauh lebih berarti dibandingkan dengan pengusaha pribumi, kadang-kadang kita dengar dikatakan orang bahwa merekalah yang sekarang merupakan "burjuasi" sebenarnya dan yang menguasai kehidupan komersial, sebagaimana Belanda dalam masa penjajahan (dalam kenyataannya, sampai mereka diusir dan nasionalisasi modalnya pada tahun 1957—'58). Orang-orang Cina ini tentu saja memegang posisi strategis di dalam struktur ekonomis; dan sementara mereka tidak menguasai "tongkat komando tertinggi" dalam ekonomi (untuk meminjam istilah Partai Buruh Inggris tahun 1950-an) seperti yang dipegang Belanda, mereka tidak pelak lagi menguasai bukit dan lembah tertentu dalam politik ekonomi. Tetapi pengaruh politiknya sangat terbatas, kecuali adanya hubungan-hubungan pribadi seperti *cukong*, yang berlangsung antara pengusaha Cina kaya dan pimpinan Indonesia dan pimpinan militer tertentu.³ Aneh menganggap masyarakat dagang Cina sebagai burjuasi Indonesia, dan menganggap

mereka memainkan peranan yang sama sebagaimana para pelopor pembangun masyarakat kapitalis. Dalam kenyataannya, justeru karena begitu banyak orang Indonesia menghubungkan kata "kapitalisme" dengan pengusaha Cina dan penguasaan ekonomi oleh orang Cina (memang benar sampai tahun 1950-an, dengan modal Belanda dan kolonialisme atau neo-kolonialisme), sehingga mereka begitu tidak menyukai setiap paham bahwa masyarakat yang sedang mencari bentuknya kini di Indonesia pada hakekatnya bersifat kapitalis.⁴ (Kaum cendekiawan Indonesia pada umumnya sangat menolak paham tersebut bahwa sejauh kekuatan pasar secara sangat langsung menentukan harga dan distribusi pendapatan dalam sejumlah besar kehidupan ekonomi—dan memang sudah berlangsung begitu lamanya, lebih dari seabad—maka masyarakat dan ekonomi secara mendasar sudah menjadi kapitalis sifatnya. Dari sini muncul himbauan terhadap konsep tandingan seperti koperasi, atau ekonomi Pancasila, atau—meskipun adanya ideologi Orde Baru yang sangat antikomunis—sejenis "sosialisme" dengan rumusan yang sangat kabur seperti yang dibayangkan Sukarno). Juga dalam hal ini pengusaha Cina tidak banyak kuasa dan pengaruhnya secara langsung dalam perumusan kebijaksanaan ekonomi dalam masa Orde Baru di Indonesia. Itulah bidang yang dipegang oleh apa yang disebut sebagai "teknokrat" di kalangan para menteri, sementara hubungan mereka dengan pengusaha Cina tidak selalu baik; dan bukan pula bidang "birokrat politik" (untuk memakai istilah Dick Robison) dan juga bukan bidang para jenderal yang menjalin hubungan dengan para *cukong* Cina. Dugaan saya adalah bahwa sementara

2 Saya kurang suka menamakannya "burjuasi" sebagaimana sering dipakai oleh para analis Marxis, karena istilah itu terlalu sarat dengan konotasi yang berasal dari sejarah Eropa yang sangat tidak tepat bagi keadaan Indonesia.

3 Lihat J.A.C. Mackie (ed.), *The Chinese in Indonesia* (Thomas Nelson for Australian Institute of International Affairs, 1976), hal. 21, 66, 271-272, penjelasan tentang *cukong*. Richard Robison memberikan uraian lebih panjang lebar tentang hubungan antara berbagai *cukong* di dalam tulisannya "Towards a Class Analysis of the Indonesian Military Bureaucratic State" *Indonesia* No. 25, 1978, hal. 31-32 dan 38.

4 Robison mengatakan bahwa "negara Indonesia selama abad yang lalu adalah negara kapitalis, yang menciptakan kondisi buat akumulasi modal dan menjamin dominasi sosial berbagai faksi di dalam burjuasi"; lihat "The Transformation of the State in Indonesia", *Bulletin of Concerned Asian Scholars*, vol. 14, no. 1, Januari-Maret 1982, hal. 48. Saya lebih suka berbicara tentang Indonesia yang menganut sistem ekonomi, yang pada hakekatnya, kapitalis selama masa itu; sistem tersebut menciptakan suatu masyarakat yang semakin menjadi kapitalis. Saya tidak terlalu menyetujui perumusan bagian kedua dalam kutipan di atas, meskipun saya setuju dengan isinya secara keseluruhan.

mereka mampu, sampai tingkat tertentu, mempengaruhi keputusan *khusus* (misalnya yang ada hubungannya dengan pembagian lisensi, kontrak, kredit dan sumber-sumber yang serupa, atau kadang-kadang dengan mengangkat seseorang ke dalam suatu jabatan), pengaruhnya jarang lebih dari itu, misalnya sampai menyentuh masalah kebijaksanaan ekonomi yang lebih luas.

Bilamana kita mulai meneliti implikasi hubungan yang aneh semacam ini lebih mendalam, yaitu saling kait mengait antara harta dan kekuasaan yang berlaku di negara seperti Indonesia, segera kita berhadapan dengan masalah yang tidak lazim. Jelas bahwa sudah terjadi perubahan pola distribusi harta yang sangat besar sejak tahun 1945, terutama dalam sektor padat modal. Perubahan-perubahan ini jelas ada hubungannya (mungkin sangat banyak?) dengan perubahan panggung politik di Indonesia selama beberapa dasawarsa terakhir. Tetapi apakah semuanya itu sebab atau akibatnya? Atau kedua-duanya? Dan kalau itu akibatnya, bagaimana kita bisa memilih dan memilah atas cara manakah gerangan sebab musabab tersebut saling berhubungan satu sama lain? Menurut paham Marxis lama, fenomena politik pada umumnya dipandang sebagai hasil kekuatan ekonomi, budaknya, bukan tuannya. Distribusi kekayaan secara mendasar dianggap sebagai faktor *penentu* pola hubungan kekuasaan. Tetapi kerap kali tidak begitu jalannya di Indonesia. Di sana "politik adalah panglima", boleh jadi begitu dikatakan mendiang Presiden Sukarno dan siapa tahu bisa benar), dan bukan ekonomi. Mudah untuk mengutip setumpuk contoh tentang ini, tetapi tidak gampang menekankan mengapa persisnya kita harus menjungkir balik begitu banyak asumsi kita yang biasa tentang masalah tersebut.

Jelas, jawabannya ada hubungannya dengan sifat masyarakat politik Indonesia yang pada dasarnya bersifat "patrimonial"—yakni, kenyataannya bahwa semua kekuasaan berpusat di puncak struktur politiko-ekonomik; tidak ada pusat kekuasaan tandingan dalam artian Galbraith (kalau ada maka sangat sedikit dan sangat lemah), yang berjalan seiring dengan pengendalian secara efektif terhadap hampir semua sumberdaya dan lisensi, kredit dan lain-lain yang menjadi kunci penghasil

kekayaan.⁵ Sistem semacam itu mengandung ciri-ciri memiliki arus kuat dari "atas ke bawah" bukan saja dalam kekuasaan dan sumber dana negara tetapi juga informasi, nasihat teknis, gagasan tentang bagaimana sesuatu harus dilaksanakan; singkatnya, praktisnya hampir semua atribut-atribut suatu wewenang. Hampir tidak ada struktur arus masukan ke dalam proses pengambilan keputusan dari bawah ke atas, tidak ada arus saran, desakan, tuntutan—atau pajak, dalam hal itu. Tetapi mengapa hal itu begitu menyoloknya di dalam Orde Baru tidak segera jelas. Yang pasti hal semacam itu tidak terjadi pada tahun 1955 dan 1956. Kekuasaan negara pada waktu itu secara menyolok lemah dan Soedjatmoko pada waktu itu menulis dengan meyakinkan tentang *difusi* kekuasaan dan kewenangan di Indonesia dan tentang kendala terhadap usaha pemerintah yang mencoba memusatkannya.⁶ Semua itu sudah berubah sampai tak ada bekas-bekasnya lagi, karena sentralisasi kekuasaan yang berlebih-lebihan menjadi persoalan yang menimpa Indonesia sekarang, tidak adanya desentralisasi yang efektif atau kekuasaan tandingan dalam bentuk apa pun dalam sistem "patrimonial".⁷

Mungkin menarik membandingkan Indonesia dengan Filipina. Di Filipina ada begitu banyak keluarga kaya yang kini berada di bawah kekuasaan Presiden Marcos. Keluarga kaya semacam itu tidak ada di Indonesia. Ada satu dua keluarga kaya, tetapi hampir tidak dapat dibandingkan dengan Filipina. Perbedaan yang lebih menyolok antara Indonesia dan Filipina adalah bahwa sektor milik negara dalam ekonomi jauh lebih besar

5 Pembahasan yang bagus tentang wajah patrimonial struktur politik-ekonomi Indonesia bisa dibaca dalam tulisan Harold Crouch, "The New Order: the Prospect for political Stability" dalam J.J. Fox *et al.*, *Indonesia: Australia's Perspectives* (ANU Press, 1980), hal. 657-667.

6 "The Role of Political Parties in Indonesia", dalam Philip W. Thayer (ed.) *Nasionalism and Progress in Free Asia* (Johns Hopkins Press, 1956), hal. 128-140.

7 Saya membahas lebih panjang lebar tentang kecenderungan sentralistis yang berlangsung di Indonesia pada tahun 1970-an di dalam tulisan saya "Integrating and centrifugal factors in Indonesian Politics Since 1954" dalam J.J. Fox *et al.*, *op.cit.*, hal. 669-684.

di Indonesia dibandingkan dengan Filipina.⁸ Perusahaan negara masih memegang sebagian besar perusahaan Belanda yang dinasionalisasikan pada tahun 1957-1958 dalam sektor pertanian, perusahaan impor-ekspor, perbankan, perkapalan, pertambangan timah dan beberapa bidang industri manufaktur (terutama semen) dan konstruksi. Industri minyak agak lain soalnya, sejauh Pertamina menjadi pemilik hanya dalam nama dan mengontrakkan konsesi eksplorasi dan produksi kepada perusahaan asing yang semuanya (?) milik Amerika Serikat; tidak ada modal swasta Indonesia di dalam semua ini. Dengan demikian kita hampir bisa menggunakan istilah "kapitalisme birokratik" seperti juga "patrimonial" untuk menggolongkan sistem politiko-ekonomik Indonesia, suatu yang tidak berlaku bagi Filipina. Dalam hal lain juga, ukuran, kekuatan dan peran politik-ekonomi dalam birokrasi yang sudah tua umurnya di Indonesia sama sekali berbeda, karena alasan historis yang kompleks. Namun, mau saya katakan bahwa sifat "patrimonial" rezim di Indonesia perlahan-lahan menjadi lebih penting daripada "kapitalis birokratik", sejauh kendali politik jauh lebih besar berada di tangan pemerintah dibandingkan dengan satu dasawarsa yang lalu, sementara perusahaan negara tidak terlalu berkuasa, baik di ibu kota daerah (mungkin Medan suatu kecualian) atau di Jakarta.

Kita tidak boleh terlalu mementingkan istilah semacam ini, kecuali sebagai tanda pengenal yang secara langsung mengarahkan perhatian kita kepada sifat-sifat tertentu dalam sistem politik atau sosial. Ben Anderson tidak keliru ketika dikatakannya bahwa penalaran tentang apakah Indonesia atau negara lain lebih bisa digolongkan menjadi "otoriter" atau "demokratik" atau "totaliter"—atau apa pun jenis lainnya—adalah mengelirukan, sejauh istilah itu lebih mene-

8 Saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Francisco Nemenzo dan Dr. David Wurfel untuk komentar yang berguna dalam bagian ini. Suatu gambaran bermanfaat tentang situasi Filipina diberikan oleh Wurfel di dalam tulisannya "Elites of Wealth and Elites of Power, the Changing Dynamic: a Philippine Case Study" dalam *Southeast Asian Affairs, 1979* (Institute of Southeast Asian Studies, 1979).

kankan hakekat dari suatu sifat yang menetap dalam suatu masyarakat politik dan menyembunyikan perubahan yang sedang berlangsung di dalam sistem tersebut.⁹ Pendapatnya ini juga berlaku dalam bidang ekonomi; Orde Baru jelas lebih bersifat "patrimonial" dibandingkan dengan yang berlangsung tahun 1970; dan bilamana kita tidak memahami luasnya dan pentingnya perubahan yang terjadi, berikut alasan-alasannya, maka kita akan keliru dalam analisa tentang dinamika dasarnya. Memang bagus membuat pembabakan sejarah Indonesia mutakhir secara tajam berdasarkan pergeseran bandul yang terjadi tahun 1945, 1957-1958 dan 1965. Tetapi kenyataan itu jangan menyebabkan kita tidak melihat pentingnya perubahan besar yang terjadi di antara jangka waktu itu dan kesinambungan periode tersebut.

Pada umumnya, lebih banyak perhatian sejauh ini diberikan kepada pertanyaan tentang harta dan kekayaan di Indonesia oleh penulis-penulis yang lebih terpengaruh oleh aliran Marxis daripada yang tidak ber-aliran Marxis.¹⁰ Ini sebenarnya tidak perlu mengejutkan, karena asumsi dasar dalam pendekatan Marxis terhadap pertanyaan ini—bahwa hubungan kausal pada umumnya bertolak dari bidang ekonomi kepada bidang politik, atau secara mendasar distribusi kekayaan menjadi faktor penentu pola hubungan kekuasaan di dalam masyarakat manapun—pada umumnya bisa menjadi titik awal yang sama baiknya dengan yang lain untuk menganalisa sistem sosial dan politik. Tetapi dalam hal Indonesia, analisa Marxis jarang sekali tiba pada kesimpulan yang memuaskan.

9 Makalah yang tidak diterbitkan, 1982.

10 Suatu karya yang paling kuat bergerak di dalam bidang ini adalah disertasi Richard Robison tentang *Capitalist and the Bureaucratic State in Indonesia 1965-1975* (University of Sydney, tesis Ph.D. dalam bidang Pemerintahan, 1977) dan berbagai tulisannya yang didasarkan pada penelitian tersebut. Suatu tulisan yang sudah sangat lama dan belum bisa tertandingi sampai sekarang dalam analisisnya tentang masyarakat Indonesia dari suatu pandangan yang benar-benar Marxis adalah W.F. Wertheim, *Indonesian Society in Transition* (van Hoeve, 1955). Sebuah sumbangan dari segi non-Marxis adalah tulisan Harold Crouch, "General and Business in Indonesia", *Pacific Affairs*, vol. 48, no. 4, Musim Dingin 1975-76.

kan. Mereka mengajukan pertanyaan yang tepat tetapi seringkali tidak, menurut hemat saya, memberikan jawaban yang sangat tepat atau membawa sinar baru.

Analisa Marxis resmi tentang Orde Baru cenderung keliru untuk dua alasan utama. Yang paling mendasar dalam hal ini adalah untuk menyesuaikan datanya dengan pola kategori berdasarkan kelas, mereka cenderung membuat distorsi atau membuat ekstrapolasi sampai ke suatu tingkat yang sangat menggelirakan. Kekeliruan lain yakni mereka memasukkan unsur tidak sukanya kepada rezim Orde Baru yang menyebabkan mereka melebih-lebihkan ketidakstabilan dan kebengsekannya. Akibatnya adalah tidak adanya rasa proporsi yang benar terhadap fenomena yang sedang kita bicarakan. Contoh yang bagus tentang kecenderungan pertama bisa dilihat dalam karya salah satu penulis yang paling punya potensi tentang politik Indonesia, Richard Robison, yang mengumpulkan setumpuk data yang sangat berharga tentang kepentingan bisnis berbagai kelompok di Indonesia.¹¹ Namun, saya yakin penafsiran semacam ini akan lebih bisa dipercaya, kalau dia dan yang lainnya—yang sealiran—mau mengambil pandangan yang lebih sementara, sehingga istilah-istilah seperti "burjuasi"—atau turunannya—sebenarnya belum menghablur di Indonesia dengan seperangkat kepentingan yang jelas dalam bidang sosio-ekonomis dan sikap politik. Saya akan kembali kepada masalah ini nanti. Tetapi saya ingin memakai beberapa kutipan dari karya Robison sebagai titik tolak. Menurut Robison:

"Indonesia belum mencapai tingkat masyarakat borjuis dan proletariat, tetapi masih menjadi masyarakat tuan tanah dan penggarap, pedagang kecil dan pegawai negeri, yang tak bertahan dan penganggur."

Di salah satu tempat dia mengatakan juga bahwa :

"ada kelas tuan tanah di desa/*kulak* yang merupakan dasar strategis penting buat dukungan politik bagi negara Orde Baru."¹²

Dalam kedua kutipan itu, terminologinya

mengganggu, tetapi sebenarnya secara mudah bisa diperbaiki sedikit, sehingga menjadi suatu penilaian yang tepat mengenai situasi tersebut. Seandainya saja dia tidak mengatakan tuan tanah (*landlords*) dan menggantikannya dengan pemilik tanah (*landowners*), maka kita tidak ada keberatan apa pun. *Kulak* di Rusia pasti bukan tuan tanah, tetapi para pemilik tanah yang lebih makmur sedikit hidupnya, sebagaimana menurut dugaan saya itulah orang yang dimaksudkannya di Indonesia. Tetapi masih bisa diperdebatkan apakah petani yang agak kaya bisa digolongkan menjadi suatu kelas tersendiri di Indonesia, atau apakah proses *kulakisasi* memang sedang berlangsung—meskipun sesuatu yang mirip dengan itu mungkin saja terjadi. Nanti saya akan kembali kepada masalah ini, karena "negara" adalah suatu masalah penting. Perumusan Robison terlalu menerima begitu saja bahwa itulah soalnya, sedangkan analisa saya lebih meragukan hal itu.¹³ Tetapi pertama-tama saya mencoba meneliti corak peta bumi sosio-ekonomik untuk menempatkannya dalam sebuah perspektif yang lebih jelas.

Pengaruh Politik Modal Asing

Meskipun modal asing jauh lebih besar memainkan perannya di dalam kehidupan ekonomi Indonesia sekarang dibandingkan

¹¹ Dalam salah satu tulisannya Robison mengacu kepada "kelas tuan tanah" sebagai "sekutu yang paling penting bagi militer pada tahun 1965-6" (*ibid.* hal. 57) dan di tempat lain dia juga mengatakan secara lebih khusus bahwa "kelas pemilik tanah Islam yang berkuasa" (*ibid.* hal. 52) adalah kelompok yang paling mendapat ancaman pada waktu itu oleh PKI dan mungkin juga oleh para pendukung Orde Baru. Sangat tidak mungkin mengatakan bahwa para pemilik tanah Islam adalah satu-satunya musuh pada waktu itu—meskipun para pemilik tanah non Islam juga termasuk—tetapi juga tidak bisa digolongkan begitu saja sebagai "kelas". Saya rasa perbedaan antara *landlords* dan *landowners* sama sekali arbitrer sifatnya. Sebagian besar dari mereka hanya memiliki 0,7 ha. Dan yang disebut pertama juga tidak terlalu besar; tetapi kalau kita harus menyamakan "kelas pemilik tanah Islam" tahun 1965 dengan "kelas tuan tanah/*kulak* yang berkuasa" yang merupakan basis dukungan bagi rezim tahun 1982, maka sama sekali tidak mudah menjelaskan mengapa orang Islam kini menjadi oposan pemerintah yang paling gencar, bila kita melihatnya semata-mata dari segi kelas.

¹¹ Robison, "Transformation".

¹² *Ibid.*, hal. 48, 57.

dengan antara tahun 1949 sampai 1965, tetapi pengaruhnya sama sekali tidak sebesar zaman kolonial; dan pentingnya dalam arti ekonomi dan politik, sungguh-sungguh terbatas. Dalam masa kolonial modal Belanda menguasai semua jenis perusahaan perkebunan, minyak dan pertambangan timah, perkapalan dan rel kereta, maupun hampir semua sektor ekspor-impor dan perbankan; kekayaan di bidang ini sungguh-sungguh mempengaruhi pemerintah kolonial. Dalam masa pemerintahan Sukarno, arus modal mengering hampir sepenuhnya, terjadi erosi investasi besar-besaran di dalam sektor-sektor padat modal dan sejumlah besar uang diungsikan ke luar negeri melalui pasar gelap valuta asing. Pengaruh politik perusahaan Belanda terus menurun antara tahun 1950-1957, ketika terjadi nasionalisasi. Dan posisi beberapa perusahaan asing yang masih sisa, hampir semuanya milik Inggris atau Amerika, tidak menentu antara tahun 1958 dan 1965. Namun, sejak itu status modal asing berubah secara dramatik. Bidang utama penanaman modal asing sekarang adalah minyak (sektor yang paling besar), tambang tembaga dan nikel—tetapi bukan timah—beberapa industri manufaktur (terutama tekstil), pengolahan kayu dan, tidak terlalu besar, perkebunan karet dan perbankan. Namun di dalam semua bidang ini, kecuali minyak, tembaga dan nikel. MNC yang beroperasi di Indonesia kini hanya menguasai sebagian dalam setiap sektor, bersama-sama perusahaan negara dan perusahaan swasta. Peran sertanya dalam investasi secara keseluruhan di dalam perusahaan produktif selama limabelas tahun, bilamana kita juga memperhitungkan infrastruktur seperti irigasi dan pabrik hidroelektrik, pelabuhan dan bandar dan lain-lain, boleh jadi di bawah 50 persen.

Para penganut teori dependensia atau penganut tafsiran neokolonialis tentang politik Indonesia menganggap penanaman modal asing sebagai tidak mengandung kebaikan sedikit pun; namun dalam kenyataannya justru karena modal asing secara politik begitu rawan, maka modal itu berguna bagi pemerintah Indonesia. Perusahaan asing jauh lebih gampang dipajak dan diatur dibandingkan dengan perusahaan nasional, terlepas dari yang dimaksud dengan nasional adalah

perusahaan negara atau pribumi atau perusahaan Cina, karena perusahaan jenis itu tidak pernah bisa dikendalikan secara efektif. Perusahaan asing bisa melancarkan pengaruh politik secara tidak langsung sampai tingkat tertentu melalui pemerintahnya di negara induknya. Tetapi keefektifan tekanan semacam itu jangan terlalu dilebih-lebihkan, karena kantor-kantor asing dan kedutaan ada kerja lain yang lebih penting.

Posisi industri minyak khususnya bisa memberikan penjelasan. Sejumlah besar perusahaan minyak Amerika Serikat menguasai pengeboran dan eksplorasi minyak dan gas alam di bawah lisensi Pertamina. Namun, kekuatan tawar menawar perusahaan tersebut terhadap pemerintah tidak bisa terlalu jauh dibandingkan dengan "Tiga Besar" sebelum tahun 1965, Shell, Stanvac, dan Caltex. Dalam kenyataannya, keberhasilan Ibnu Sutowo, pendiri Pertamina, pada awalnya dicapai dengan memainkan ketiga "kartu as minyak" melawan serombongan pendatang baru, "kartu kecil" yang dibawanya ke panggung pada pertengahan tahun enam puluhan dengan syarat-syarat yang dari hari ke hari dibuat semakin menguntungkan Pertamina, sampai Caltex dan Stanvac juga dipaksa untuk mengikuti jejak yang sama, sambil menghadapi pasar yang lebih kompetitif.¹⁴ Ibnu Sutowo mungkin banyak kekurangannya, tetapi dengan jelas ditunjukkannya kepada para pengusaha minyak, bahwa Pertamina kini menjadi *boss* industri minyak, bukan MNC.

Tidak ada satu sektor pun dalam ekonomi (kecuali tembaga dan nikel) di mana perusahaan asing mempunyai semacam dominasi pasar untuk mendiktekan syarat-syaratnya kepada pemerintah Indonesia. Dalam kenyataannya, banyak perusahaan manufaktur menghadapi persaingan keras di dalam pasar Indonesia dan, tambahan pula, sangat rawan terhadap peraturan dengan diskriminasi yang menguntungkan perusahaan pribumi. Memang, tidak dikatakan bahwa mereka tak berdaya atau tidak memiliki satu pun alat untuk memaksakan pengaruh politik secara

14 Lihat Alex Hunter, "The Indonesian Oil Industry" dalam Bruce Glassburner (ed.) *The Economy of Indonesia. Selected Readings* (Cornell University Press, 1971, bab. 8).

tidak langsung melalui koneksi atau suap; beberapa perusahaan Jepang khususnya seringkali dituduh berpengaruh sebagai "neokolonialis" justeru karena alasan ini. Namun, pengaruh politik semacam ini, tidak berasal dari perannya yang menentukan di dalam ekonomi tetapi lebih karena koneksi semata-mata: semakin menentukan suatu perusahaan, semakin kurang ketergantungannya pada koneksi dan suap—dan sebaliknya. Namun, pengaruhnya terbatas, lebih terhadap keputusan kebijaksanaan khusus daripada kebijaksanaan umum.

Ada satu pertanyaan lagi yang muncul sejauh mana penanaman modal asing menjadi halangan bagi perkembangan kelas pengusaha Indonesia pribumi baik sekarang maupun pada masa lalu. Mungkin banyak orang Indonesia mengatakan mereka memang menjadi penghalang; dan dalam masa kolonial memang benar. Tetapi dalam keadaan sekarang pernyataan itu sangat dapat dipertanyakan. Banyak penanaman modal asing berada dalam bidang seperti pertambangan atau industri berat yang tidak bisa diselenggarakan oleh perusahaan dagang Indonesia dengan kondisinya yang ada sekarang. Secara nisbi hanya sedikit dibuat dalam bidang di mana perusahaan Indonesia bisa bersaing. Tambahan pula, banyak pengusaha Indonesia ikut serta dalam usaha patungan dengan perusahaan asing. Dengan itu mereka mendapat modal dan *know how*. Tanpa itu mereka tidak akan mendapatkannya. Di pihak lain, penanaman modal asing bukan seluruhnya berkat, karena menciptakan sindrom dependensi dan melemahkan urat-urat kewiraswastaan. Tetapi itu cerita lain lagi.

Beragam Peran Perusahaan Negara

Perusahaan negara dan "kapitalis birokrat" (atau "birokrat politik" sebagaimana disebut Robison) sama sekali bukan fenomena baru di dalam kehidupan sosial ekonomis Indonesia. Kita bisa melihat pendahulunya dalam Tanam Paksa, di dalam serikat seperti *Nederlandsch Handelmaatschappij*, (NHM), di dalam beberapa pribadi yang memperoleh pemilikan tanah besar atau keuntungan ekonomi berkat pengaruh

pribadi terhadap penguasa kolonial di Batavia atau Den Haag. Tetapi pasti dalam abad ke duapuluh tidak ada satu pun perusahaan Indonesia dalam tujuhbelas tahun terakhir sebesar raksasa dagang di atas. Karena itu, bisa kita katakan bahwa mereka berada dalam posisi kuat untuk mempengaruhi politik, baik pada tingkatan pembuatan kebijaksanaan secara nasional atau pada tingkat provinsi atau kabupaten, di mana sebagian besar memang berperan di panggung daerah. Namun, kesan saya, pengaruh politik mereka terhadap masalah seperti penentuan kebijaksanaan ekonomi pemerintah atau permainan abadi dalam politik pribadi di dalam lingkaran pejabat dekat dengan Presiden ternyata sangat kecil.

Lantas mengapa pengaruh politik "teknokrat" begitu besar, meskipun tidak memiliki dasar politik dan finansial. Jawabannya, menurut hemat saya, haruslah terutama dicari di dalam sifat patrimonial atau birokratik masyarakat politik Indonesia. Seorang Marxis tentu saja berusaha untuk menjelaskan seluruh fenomena tersebut dari sektor negara dalam hubungan dengan pertalian struktural atau hubungan kelas antara berbagai unsur modal dalam negeri dan modal internasional di Indonesia. Tetapi ini tidak banyak membantu kita untuk memahami mengapa Bulog atau PTP—atau sebagian besar perusahaan dagang negara—memainkan peranan yang agak terbatas.

Bisa dimengerti kalau sekiranya kita mau menelusuri semua seluk beluk politik birokratik di Indonesia, akan kita tahu bahwa lembaga-lembaga ini memainkan peranan penting secara konvensional di bidang tersebut; tetapi saya ragu bahwa mereka lebih penting, kalau memang penting, daripada direktorat inti departemen seperti Keuangan, Pekerjaan Umum, atau Perdagangan, yang menguasai sebagian besar arus dana dan lisensi tapi bukan stok modal. Perusahaan negara cenderung menjadi penerima pasif atau alat kebijaksanaan pemerintah dan tidak aktif, juga bukan penentu kebijaksanaan yang berwibawa. Sampai tingkat tertentu

15 Pertamina, Perhutani, Bulog, Perusahaan Dagang Negara—PN Berdikari biasanya paling banyak dikutip, tetapi sejak awal tahun 1970-an—dan Perusahaan Perkebunan Negara.

mereka bermain sebagai pangeran-pangeran bebas, sambil melayani kepentingan pribadi dan kepentingan kelembagaan para pejabatnya—dan kadang-kadang kepentingan sekutu politik atau mentor para pejabat yang mampu mengatur pengangkatannya; kepada orang semacam itulah upeti dalam bentuk uang harus diberikan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa lembaga-lembaga semacam itu sebagian besar dipakai sebagai sumber "keuangan tidak resmi" dan dana taktis untuk unit-unit angkatan bersenjata dan sebagian aparat pemerintah dalam dasawarsa pertama Orde Baru. Di sanalah dibangun jaringan kepentingan yang kompleks dan berliku-liku dan kewajiban satu terhadap yang lain. Namun, semua ini kurang berperan dan kurang penting, sejak penerimaan dalam anggaran negara menjadi semakin besar dalam pertengahan tahun 1970-an. Saya yakin, hakekat perubahan inilah yang harus kita pahami, bilamana dinamika Orde Baru harus dilihat dalam suatu perspektif. Karena di sini lagi, agaknya politik sebagai panglima menunjukkan kuasanya, bukan ekonomi. Atau, kalau mau dikatakan dengan cara lain, kemampuan untuk menguasai arus dana dan bukan sekedar harta modal. Saya yakin, penjelasan tentang paradoks ini bisa lebih berhasil dicari di dalam analisa tentang sifat patrimonial masyarakat politik Indonesia dan bukan di dalam teori-teori struktural yang menjelinet tentang masyarakat "kapitalis" di Indonesia.

Munculnya Kelas Menengah ?

Pengembangan secara tahap demi tahap dalam kelas menengah kota di Indonesia selama tigapuluh tahun terakhir tak pelak lagi merupakan fenomena sosio-ekonomik yang cukup penting. Tetapi berapa pentingnya? Pada awal tahun 1950-an hanya ada kelas menengah dalam tahapan embrio, yang pada dasarnya terdiri dari para pegawai negeri dan segelintir para profesional. Sekarang penduduk kota sudah menjadi jauh lebih besar jumlahnya sehingga menjadi 10-15 persen dari seluruh jumlah penduduk, meskipun hanya sebagian kecil saja bisa dianggap sebagai "kelas menengah". Jarak antar pekerjaan dan jarak dalam sektor ekonomi di mana orang Indonesia pribumi

berkuasa menjadi jauh lebih luas, gaya hidup yang khas kelas menengah sudah muncul, dan orang Cina dan orang asing lainnya menjadi tidak terlalu penting lagi. Dengan demikian hal itu menjadi suatu kekuatan yang jauh lebih berarti daripada yang biasanya. Dalam krisis politik, pengaruh orang-orang ini bisa menjadi sangat penting meskipun tidak menentukan. Kelas menengah kota Indonesia—dengan kecualian kecil—bukan pemilik harta yang luar biasa; pandangan dan kepentingan politiknya sama sekali tidak padu; dan mereka bisa disebut "kelas" hanya dalam artian longgar sehari-hari, bukan berdasarkan definisi ketat. Kesinambungan kesetiaan dan kepentingan lama masih memotong lintas setiap kekenyalan kesadaran dan solidaritas kelas jenis manapun. Afiliasi politik seseorang, apakah Golkar atau PPP atau PDI, atau organisasi politik yang lain, agaknya masih saja ditentukan terutama, oleh latar belakang agama dan sukunya, ikatan keluarga atau asosiasi pendidikannya—pada hakekatnya, apa yang biasanya disebut ikatan *aliran*. Dan pembagian antara *pribumi* dan 'Cina, tentu saja, satu dari yang paling dasar dari semua rintangan bagi suatu rasa solidaritas kelas menengah yang kuat.

Sejauh ini kurang lebih hanyalah gaya hidup bersama dan bukan kepentingan kelas yang sama yang secara perlahan-lahan menciptakan kesamaan pandangan terhadap masalah negara (atau kesadaran bersama) di kalangan unsur-unsur kelas menengah yang agak luas di dalam penduduk kota Indonesia. Ali Sadikin mungkin mengungkapkan kesadaran baru orang kota secara lebih efektif dibandingkan dengan siapa pun; dalam banyak hal dia merupakan inti-intinya manusia kelas menengah tahun 1970-an di Indonesia, pakaian rapi dan semua-semuanya.¹⁶ Tetapi meskipun kita menyaksikan munculnya secara perlahan-lahan kelas menengah yang sadar diri di Indonesia, pertumbuhannya berlangsung dalam suatu proses lamban. Misalnya sekarang, tidak ada ide-

¹⁶ Saya sangat berterima kasih kepada Russell Lapthorne, bekas mahasiswa Pascasarjana Universitas Monash, yang menguraikan dengan begitu terperinci tentang gaya hidup elite Jakarta yang mengalami perubahan pada pertengahan tahun 1970-an.

logi pemersatu dan tidak ada rasa berbagi kepentingan kelas yang kuat terhadap kelompok sosial yang lain. Hal ini mungkin akan berubah bilamana semakin banyak anggota kelas menengah kota mendapat harta dan kepentingannya menjadi satu dengan kerjanya sistem kapitalis, sehingga jaminan adanya gelar, keteraturan prosedur birokratik dan dihapusnya (atau dikurangnya) korupsi dan keputusan yang arbitrer oleh para pejabat, menjadi penting bagi mereka. Namun, semuanya belum berjalan terlalu jauh. Tambahan pula, terdapat kecaubalauan ideologis yang cukup besar di Indonesia; bahkan kursus-kursus P4 selama lima tahun terakhir tidak dapat mengatasi.¹⁷ Sosialisme dan Komunisme menjadi konsep tabu sejak tahun 1965, namun beberapa orang Indonesia masih dengan penuh keyakinan menganut kebajikan kapitalisme atau apa yang oleh Sukarno biasanya dikatakan *free fight liberalism*, karena "kapitalisme" tetap menjadi kata kotor. Sedikit sekali komitmen kepada doktrin utama dalam ideologi borjuis tradisional menurut tradisi Eropa; tak tercemarnya milik pribadi, individualisme, perusahaan bebas, keuntungan dalam kompetisi bebas di pasar atau *rule of law*. Ada tanda-tanda bahwa beberapa anggota kelas menengah Indonesia secara perlahan-lahan menjadi yakin tentang yang disebut pertama dan yang terakhir, sekurang-kurangnya, menjadi penting bagi mereka secara pribadi dan kepentingan hartanya dan demi kesehatan masyarakat Indonesia masa depan; dan ketika burjuasi pemilik harta semakin bersatu, mungkin bisa kita nantikan bahwa dukungan bagi prinsip ini akan semakin besar. Tetapi prosesnya tidak berjalan cepat—dan bisa dengan gampang dialihkan arahnya.

Kekuatan Ekonomi Cina Indonesia

Tidak ada yang membantah bahwa kelompok etnis Cina di Indonesia pada umum-

nya semakin naik di dalam tangga sosial selama tigapuluh tahun terakhir; dan kini menduduki banyak posisi puncak, jauh lebih dibandingkan dengan tahun 1930-an atau tahun 1950-an.¹⁸ Dulu, orang Belanda dengan segala cara menghindari orang Cina untuk menduduki sektor-sektor ekonomi yang menguntungkan. Kini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa hampir semua orang Cina (bersama dengan MNC, perusahaan negara dan beberapa "kapitalis birokrat") menduduki posisi paling tinggi yang dulunya diduduki Belanda. Tetapi kesimpulan semacam itu tidak seluruhnya tepat, karena ada perbedaan besar antara kedua situasi.

Tentang statusnya sebagai "kelas menengah", tidak ada yang bisa membantah bahwa Cina Indonesia—sesuai dengan sifat kelas menengah pada umumnya di mana saja di dunia ini—tinggal di kota (karena dilarang tinggal di desa, kecuali dalam beberapa kasus saja), mempertahankan gaya hidup yang pada dasarnya gaya hidup kelas menengah, sangat mementingkan pendidikan, bakat kewiraswastaan, merembes kekayaan dan tanggung jawab pribadi; mereka sangat terlibat di dalam mengejar keuntungan di bidang komersial, industri, atau profesional (sekali lagi, karena sedikit atau tidak ada kesempatan bagi mereka untuk menjadi petani, pegawai negeri atau tentara), dan, pada umumnya, jauh lebih kaya dari kebanyakan orang Indonesia. Tetapi juga ada orang Cina miskin—meskipun mungkin juga benar bilamana dikatakan bahwa tidak banyak lagi dari mereka yang miskin pada masa sekarang, baik dalam arti absolut maupun dalam arti relatif, dibandingkan dengan masa kolonial, ketika kuli-kuli Cina menarik becak di Batavia dan kota-kota besar lainnya, sesuatu yang tidak banyak orang Indonesia bersedia lakukan, atau bersedia melakukan berbagai kerja kotor yang dihindari oleh rekanannya pada masa sekarang. Tetapi bukan orang

sangat dipengaruhi oleh diskusi dengan Dr. Dan Lev. Tulisannya tentang pandangan Indonesia mengenai "rule of law" telah meneliti masalah ini jauh lebih luas daripada yang saya buat di sini.

¹⁸ Rangkuman yang singkat tentang kecenderungan ini baca bagian tentang "Changing Economic Roles" dalam Mackie (ed.) *The Chinese in Indonesia*, hal. 12-16.

¹⁷ Pembahasan yang baik tentang kursus P4 dan relevansinya bagi ideologi elite Indonesia, baca Michael Morfitt, "Pancasila: The Indonesian State Ideology according to the New Order Government", *Asian Survey*, vol. 21, no. 8, April 1981, hal. 838-851. Pemikiran saya tentang masalah ini

Cina semata-mata yang tampil sebagai kelas menengah Indonesia, dan juga bukan menjadi unsur yang paling penting di dalamnya. Dalam hal penting, mereka cuma berdiri di pinggir, mengikuti garis-garis perubahan sosial dan politik di Indonesia bukan menentukannya. Mereka tidak dapat mencita-citakan suatu peranan utama dalam membentuk masyarakat kapitalis dan peradaban baru di Indonesia, menurut cara yang diyakini Marx dilakukan borjuis baru di Eropa abad 19, yakni sebagai dukun tatanan sosial yang baru. Peranan yang diperkenankan kepada mereka di dalam kehidupan ekonomi dan sosial di Indonesia tetap disunat—dengan satu konsekuensi yang sangat penting, bahwa semakin banyak anak-anak Cina Indonesia dikirim ke perguruan tinggi di luar negeri dan tidak kembali, dengan akibat meningkatnya kosmopolitanisasi dalam kelompok kaya di dalam kelompok etnik Cina di seluruh Indonesia dan terjadi *brain drain* yang merugikan negara, baik dalam sumberdaya manusia maupun sumberdaya finansial. Ini sama sekali bukan perilaku yang diharapkan dari kelas borjuis yang dominan.

Sementara sebagian besar orang Cina tinggal di Jakarta dan lima atau enam kota provinsi besar lainnya, setiap generalisasi tentang pengaruh ekonomi dan sosialnya harus juga memperhitungkan ratusan ribu orang Cina yang tersebar di kota-kota kecil di Nusantara. Di beberapa tempat ini orang-orang Cina kaya dan berkuasa tentu saja sangat besar jumlahnya; di kota lain—mungkin—sangat kecil. Keadaan setempat dan sejarah masyarakat Cina masa lalu bisa sangat berbeda, terutama hakekat hubungannya dengan masyarakat pribumi; semuanya menyebabkan usaha mengambil kesimpulan secara pukul rata menjadi berbahaya.

Hampir di semua pusat pasar di seluruh wilayah Indonesia bisa kita amati, bahwa sebagian besar pengusaha Cina bergerak di toko-toko yang menawarkan teknologi tinggi, barang-barang mahal, seperti perlengkapan elektronik dan alat foto, televi dan di mana-mana alat video, lemari pendingin dan barang-barang elektrik lainnya, dan sebagainya—hampir semuanya termasuk bilangan benda-benda yang membutuhkan pelayanan pascajual dan reparasi; karena itu juga dibutuhkan latihan staf dan pengetahu-

an teknis yang lebih dari biasa, demikian pun organisasi yang tidak seperti biasanya, kemampuan yang membuatnya bisa diandalkan. Inilah sifat-sifat yang jarang sekali dimiliki oleh pengusaha kecil Indonesia dibandingkan dengan perusahaan keluarga Cina, demi alasan yang pada umumnya sangat terkenal. Karena itu, tak terhindarkan bahwa, orang Cina cenderung untuk dominan di dalam bidang ini—dan cepat mengambil keuntungan dari kesempatan penjualan di dalamnya. Ini berarti bahwa mereka kini, sebagaimana sejak dulu demikian di seluruh Asia Tenggara, berada di garis depan untuk membuka tahap-tahap kegiatan bisnis baru yang didasarkan pada teknologi moderen. Tidak ada yang mengejutkan atau tercela dalam hal ini, bahkan kalau sekiranya kita setuju dengan pandangan bahwa "teknologi tepat" yang lebih sederhana, kurang mahal, akan membawa keuntungan buat negara ini jauh lebih besar dalam jangka panjang; inilah bidang yang harus dibenahi oleh kebijaksanaan pemerintah dengan nilai tukar dan harga barang modal, dan bukan ditentukan oleh pelayan toko Cina. Memang benar orang Cina lah, dalam arti tertentu, pelopor proses mengacaukan wilayah pedesaan Indonesia dengan produk teknologi tinggi hasil sistem kapitalis internasional; tetapi bukan karena mereka melihat dirinya sebagai agen kapitalisme internasional. Mereka pun tidak mempunyai banyak pilihan, karena semakin disingkirkan dari begitu banyak bidang dalam kehidupan ekonomi.

Kalau pun kita harus memberikan nama kepada kelompok-kelompok bisnis Cina dan kelas profesional di Indonesia, maka istilah "burjuasi" kini kurang tepat dibandingkan dengan istilah jelek tetapi cukup memberikan penjelasan "pengusaha pariah" (*pariah entrepreneurs*) sebagaimana diberikan oleh Fred Riggs lebih dari duapuluh tahun yang lalu tentang pengusaha Cina di Muangthai dan Filipina.¹⁹ Mereka tetap sangat tergantung dari kehendak baik para penguasa dalam semua tingkat. Skala waktu bagi jenis investasi yang mereka buat memang singkat, karena mereka tahu bahwa bisnisnya gam-

19 Tentang "pariah entrepreneurs" baca Fred W. Riggs, *Administration in Developing Countries: The Theory of Prismatic Society* (Houghton Wifflin, 1964), hal. 141-9, 184-193.

pang dihancurkan bila tiba pertikaian rasial berikutnya atau kekerasan sosial yang sebentar-sebentar lagi mungkin terjadi. Tidak mengejutkan sama sekali bahwa mereka akan berbuat sebaik-baiknya untuk menggarap para penguasa di daerah untuk menjamin perlindungan (atau agar para penguasa tersebut juga meningkatkan praktek semacam itu)—dan karena itu oleh orang Indonesia yang biasa dianggap sebagai bagian dari struktur kekuasaan di daerah atau di tingkat nasional, yang menguasai sumberdaya penting seperti uang tunai, kredit dan harta kekayaan di kota. Dalam arti tertentu memang demikianlah mereka. Namun dalam saat yang sama mereka tetap orang luar, dan karena itu rawan—dan sangat sering tidak ter-lalu berkuasa secara politis.

Persekutuan Kelas Baru di Wilayah Pedesaan ?

Seringkali dikatakan bahwa sedang terjadi proses polarisasi sosial selama kurang lebih limabelas tahun terakhir di pedesaan Indonesia, terutama Jawa. Semuanya terjadi lebih-lebih karena dua perkembangan ini. *Pertama*, dampak Revolusi Hijau, yang kelihatannya sangat menguntungkan para petani kaya yang biasanya mempunyai tanah yang paling baik atau paling tepat (yaitu dengan irigasi yang terbaik) dan yang juga mempunyai sumberdaya finansial, kontak pribadi dan keterampilan yang memungkinkan mereka mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari bibit padi unggul, sementara petani yang lebih kecil atau lebih miskin pada umumnya tidak mampu. Robison yakin bahwa "tuan tanah pedesaan memegang kuasa/kelas *kulak* merupakan dasar penting dan strategis bagi dukungan politik negara Orde Baru". Perkembangan *kedua*, sebagian ada hubungannya dengan yang pertama, adalah semakin meleburnya dalam satu jaringan antara "elite desa" dengan kelas menengah kota kecil, yang terdiri dari pejabat pemerintah tingkat bawah, pejabat militer dan pengusaha, para rentenir, pedagang dalam produk pertanian dan sebagainya. Kedua proses tersebut biasanya dikutip sebagai contoh penetrasi ke dalam ekonomi Indonesia tradisional, ekonomi desa yang berorientasi subsistensi oleh tatanan masya-

rakat "kapitalis" yang lebih komersial, tamak, yang secara keras merombak hubungan sosial di sana; proses ini dikatakannya sebagai sesuatu yang tidak terelakkan, mungkin juga bahkan dimaksudkan, sebagai hasil kebijaksanaan ekonomi yang dianut pemerintah untuk menarik Indonesia semakin dekat kepada lingkaran ekonomi internasional.

Agaknya tidak dapat diingkari bahwa memang terjadi hal semacam itu di banyak wilayah Jawa, mungkin juga hampir semuanya. Bilamana kedua proses perubahan ini tetap berlangsung, tentu saja dalam perjalanan waktu akan terjadi dampak yang sangat luas. Tetapi seberapa luas dan apakah sifat perubahan-perubahan ini masih harus dinilai dengan agak hati-hati. Sesungguhnya sampai sekarang sedikit sekali pengetahuan kita tentang dampak secara keseluruhan kedua proses tersebut di atas, selain dari bukti-bukti yang diperoleh dari segelintir studi pedesaan Indonesia yang intensif.²⁰ Ada beberapa alasan yang sangat kuat untuk meragukan kemampuan keduanya membawa perubahan yang sungguh-sungguh di sebagian besar wilayah Jawa, sebagaimana akan saya katakan nanti. (Saya tidak menolak kemungkinan bahwa di beberapa wilayah ada perubahan semacam itu, tetapi bukti-bukti untuk itu masih agak samar-samar). Kritik terhadap Orde Baru cenderung melebih-lebihkan luas jangkauan kedua jenis perubahan di atas, demikian menurut pendapat saya, karena kedua hal tersebut cenderung memperkuat hipotesa bahwa "proses penetrasi" terhadap pertanian Indonesia sedang berlangsung cepat, atau sedang terjadi komersialisasi. Pernyataan kedua rasanya sulit diingkari, tetapi arti sesungguhnya dari apa yang terjadi di pedesaan selama beberapa tahun masih terlalu sulit untuk dinilai.

Di atas segala-galanya, implikasi kelas dari perkembangan ini bagi saya tidak merupakan bukti penguat bahwa kedua proses perubahan yang disinggung di atas sudah berjalan sejauh itu. Kalau keduanya memang sangat

20 Pernyataan utama tentang hipotesa "polarisasi" dalam tahun 1970-an bisa diperoleh di dalam berbagai tulisan William L. Collier dan rekan-rekannya di Agro-Economic Survey di Bogor: Collier agak berubah pandangannya dalam hal tertentu, meskipun lebih tentang aspek penggeseran tenaga kerja dalam bibit unggul, daripada polarisasi sosial.

berarti, maka yang bisa kita harapkan adalah keduanya menjadi tanda-tanda munculnya tatanan sosial yang dikuasai oleh kelas khusus petani kaya, sesuatu seperti *kulak* di Rusia, mungkin (atau, untuk mempergunakan analogi yang kurang tepat, suatu kelas yang terdiri dari para *yeoman* keras, bebas, sejenis yang diteliti oleh Geertz dalam studinya di Mojokuto dalam tahun 1950-an), yang boleh jadi dekat, atau juga tidak, pandangannya dengan kelas menengah kota yang baru itu. Saya ragu apakah memang ada tanda-tanda tentang ini; saya tidak mendapat kesan bahwa sedang terjadi proses *kulakisasi* para petani Jawa atau bakal terjadi dalam waktu dekat ini. Dengan kata lain, sekurang-kurangnya diharapkan agar petani-petani itu menjadi kelompok "petani dominan", seperti yang oleh D.A. Low diamati di India, Afrika dan banyak wilayah dunia lainnya sebagai unsur penting di dalam struktur kekuasaan daerah dan nasional. Bahkan kalau kita dapat mengidentifikasi golongan "petani dominan" di daerah-daerah di Jawa, mereka sama sekali belum bisa digolongkan sebagai "kelas" dalam arti sesungguhnya dan juga mereka belum sangat dominan, baik dalam tingkatan daerah atau sebagai kelompok veto yang potensial terhadap pemerintah pusat, seperti di India.

Untuk menempatkan masalah ini dalam proporsinya, saya ingin mengemukakan dua hal penting. Pertama, yang berhubungan dengan makna teknologis dan ekonomik bibit unggul untuk organisasi sosial pertanian padi di Jawa. Panen yang lebih besar yang diperoleh dengan bibit unggul tak pelak lagi sangat meningkatkan harga tanah sawah yang baik, meskipun adanya ongkos tambahan yang harus dipenuhi para petani untuk keperluan pupuk dan pestisida. Kita harus catat pula perbandingan yang sudah berubah antara penghasilan setahun per hektar untuk beras dan hasil lainnya (tebu adalah contoh yang paling menyolok, karena kini menjadi tanaman yang kurang membawa keuntungan untuk ditanam di sawah dibandingkan dengan padi, di hampir semua daerah), atau tanaman dengan siklus tiga kali panen yang jauh lebih menguntungkan yang kini dimungkinkan dengan bibit unggul karena bertumbuh lebih cepat, untuk mengetahui bahwa tanah sawah kini menjadi harta yang

jauh lebih bernilai daripada biasanya. Dan ada puluhan bukti tentang tanah sawah di desa yang dibeli oleh orang luar dalam jumlah yang semakin besar, kerap kali oleh pegawai negeri dan orang-orang lain yang bekerja di kota dengan penghasilan tunai dalam jumlah besar. Sebaliknya, seringkali dikatakan bahwa petani kecil dipaksa untuk menjual sawahnya karena biaya produksi yang semakin meningkat (atau haruskah kita katakan "karena digoda oleh harga tanah sawah yang lebih tinggi"?). Tetapi untuk melompat dari generalisasi ini kepada kesimpulan lanjutan lainnya—bahwa petani paling kaya semakin banyak membeli tanah dan petani paling miskin menderita kerugian—sudah hampir pasti tidak benar. Kita tidak mempunyai banyak data yang bisa diandalkan tentang berapa jauh kecenderungan ini. Tetapi kesan saya, tidak ada satu pun yang mencapai tahap sebagaimana dikemukakan pengeritik pemerintah Orde Baru. Dan alasan mengapa hal itu tidak terjadi juga bisa menjelaskan persoalan.

Pertama, tidak ada keuntungan intrinsik dalam pengolahan sawah secara besar-besaran dibandingkan dengan pengolahan secara kecil-kecilan. Para petani dengan luas tanah yang kecil agaknya mampu menghasilkan padi per hektar dari bibit unggul sebanding dengan hasil dari pemilik tanah besar; dalam kenyataannya ada dasar untuk percaya bahwa penghasilannya kadang-kadang malah lebih tinggi, karena mereka mengolah dan menyiangi tanahnya secara lebih intensif dan lebih teliti. Bahkan di mana mereka tidak gampang memperoleh kredit *murah* dibandingkan dengan petani kaya, tidak mungkin bagi mereka untuk memperoleh kredit yang diperlukan untuk membeli pupuk dan insektisida dalam tahun-tahun terakhir. Karena, produksi dalam skala besar kadang-kadang menjadi faktor penting di dalam produktivitas pertanian di wilayah lainnya di dunia ini, tidak mengharuskan kita mengambil kesimpulan bahwa hal ini juga berlaku bagi Indonesia. Ada berbagai macam alasan mengapa petani kecil tanpa adanya persediaan keuangan tetap saja dipaksakan untuk menjual tanahnya, suatu proses yang sudah berlangsung selama berdasawarsa dan sama sekali bukan menjadi akibat teknologi baru dan komersialisasi

pertanian yang semakin besar. Mungkin benar—dan mungkin juga tidak benar—bahwa proses tersebut menjadi semakin dipercepat sejak tahun 1980-an; kita memang tidak tahu karena tidak ada cukup data. Dan justru karena bukti tentang hal itu tidak memungkinkan kesimpulan, masuk akal untuk menarik kesimpulan bahwa proses polarisasi sosial belum mulai bergulir membesar seperti bola salju dengan kecepatan tinggi manakala petani kaya berlumba-lumba untuk membeli tanah orang miskin.

Kedua, sementara penghasilan tunai yang bisa diperoleh dari tanah sawah jauh lebih besar dari dasawarsa-dasawarsa dari tahun 1970, tidaklah berarti bahwa tanah semacam itu menjadi investasi yang sangat menguntungkan bila dibandingkan dengan cara lain menggunakan dana surplus. Hasil tanaman seperti cengkih, dan vanila, meskipun penuh resiko, memberikan hasil yang jauh lebih tinggi, sehingga petani atau pedagang yang tajam akalnya di Indonesia, yang memikirkan investasi dalam tanah belum membuat pilihan paling rasional bilamana dia sematamata atau sepenuhnya terjun ke sawah. Dalam kenyataannya, ketika saya mengajukan pertanyaan tentang cara bagaimana petani kaya mempergunakan kekayaannya lebihannya, saya mendapat informasi bahwa mereka tidak (atau jarang sekali) hanya membeli tanah sawah yang besar-besaran. Namun itulah kesan yang sering diperoleh seorang dari rumusan kasar tentang teori: yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Sikap investasi para petani kaya agaknya bermacam-macam. Katanya, banyak yang membeli mesin giling atau truk atau colt, atau berpindah kepada kegiatan pemasaran produksi pangan (bukan saja padi tetapi juga palawija dan sayur mayur, yang bisa membawa keuntungan besar). Beberapa membeli tanah untuk tanaman keras di wilayah terdekat, yang lain membeli harta di kota, atau sebagai investasi, atau untuk tempat tinggal keluarga dari isteri kedua. Mungkin bentuk "investasi" yang paling biasa bagi semua orang adalah pendidikan anak-anak dan naik haji ke Mekah, sebuah jawaban yang berulang kali diberikan dalam menjawab pertanyaan tentang masalah ini.

Singkatnya, sangat keliru menarik kesimpulan bahwa permintaan akan tanah sawah

meningkat secara deret ukur sebagai akibat dimasukkannya bibit unggul, atau nilai tanah meningkat tinggi karena "komersialisasi" licik di bidang pertanian. Sebaliknya, permintaan akan sawah dari luar masyarakat desa jarang mengandung alasan *komersial* (atau "kapitalis") sekuat alasan tradisional; orang masih menganggap pemilikan tanah sawah sebagai cara paling aman sebagai jaminan masa pensiun atau masa sulit nantinya. Sawah juga memberikannya rasa aman secara psikis, atau identifikasi dengan tanah, desa dan rakyat biasa, yang semuanya menjadi modal incaran orang kota yang terperangkap dalam peralihan kultural. Memang, sekarang makin lebih banyak lagi orang yang mampu membeli sawah bila saja ada kemungkinan dan bisa didengar bagaimana seorang memiliki lusinan hektar di berbagai daerah di negara itu—tetapi tidak pernah ada cerita tentang ratusan hektar. Dan karena Undang-undang Agraria tahun 1960 memberikan pasal-pasal yang mengatur masalah pemilikan tanah dan pengalihan tanah jauh lebih jelas dan luwes daripada yang terdahulu, maka pembelian dan penjualan tanah semakin meningkat tajam (yakni sisi penawaran dalam pasar tanah meluas, demikian pula sisi permintaan). Juga alasan yang tidak kurang pentingnya karena semua warga Indonesia, termasuk Cina WNI, kini secara hukum berhak membeli tanah di mana pun mereka mau. Namun masih saja kita dengar tentang lurah yang sama sekali tidak memperkenankan orang luar membeli tanah; berapa banyak kasus semacam itu tidak ada orang yang tahu. Secara keseluruhan, masih sedikit pengetahuan kita tentang dinamika perubahan pemilikan tanah di Indonesia, terutama tentang *mengapa* orang membeli dan menjual tanah. Tetapi jelas bahwa ada banyak faktor lainnya lagi yang harus dipertimbangkan selain keuntungan dan kerugian teknologi padi unggul.

Untuk beralih kepada aspek perubahan di pedesaan Jawa yang lebih luas secara sosio-politik, menyatunya kepentingan dan pandangan elite desa dan elite birokratik kota kecil, kita temui suatu pola hubungan yang sangat bermacam-macam dan kompleks. Dari pengalaman negara lain, dulu dan sekarang, kita bisa berharap bahwa ada saja titik temu antara kepentingan kelas di kalangan

kelompok-kelompok ini, baik terhadap desa-desa miskin yang diperasnya maupun dengan unsur-unsur kelas menengah di kota-kota besar yang mau ditenteramkannya. Tetapi kenyataan bahwa proses pertemuan semacam itu kini sedang berlangsung bagi saya sangat tidak meyakinkan. Kita tanyakan bagaimana cara berlangsung hubungan kausalnya, apakah elite desa meluaskan kekuasaannya lokalnya dan pengaruhnya ke dalam sektor kota, atau apakah sebaliknya pegawai rendah di dalam hirarki pemerintahan sipil dan militer mempergunakan kekuasaan politiknya untuk memperoleh tanah, kekayaan dan pengaruh sosial di desa, segera jelas bahwa tidak ada satu pun bukti yang mendukung pernyataan pertama dan sedikit sekali yang mendukung pernyataan kedua. (Dan sejauh ada kasusnya, itu hanya membuktikan selanjutnya tentang supremasi bidang politik terhadap bidang ekonomi, kepada kekuasaan pejabat dan kepegawaian daripada kekuatan para pemilik tanah.) Namun, lebih menyentuh soalnya, bilamana ditekankan bahwa hubungan yang sedang diciptakan antara kedua strata sosial tersebut merupakan bagian dari suatu proses yang jauh lebih luas yaitu mengaburnya garis-garis pemisah antara masyarakat desa dan kota kecil. Proses itu sudah berlangsung selama berdasawarsa di sebagian besar wilayah Jawa, kecuali wilayah-wilayah yang lebih terpencil.

Kesempatan pendidikan, mobilitas sosial, pola perkawinan di luar desa dan transportasi yang membaik, semuanya mempercepat proses ini sejak Perang Dunia II. Demikian pula impuls politik dan ekonomi yang lebih langsung yang berlaku di bawah Orde Baru—misalnya, meningkatnya kontak antara agen pemerintah dan desa, diperkuatnya kewenangan camat terhadap lurah, kontrol pemerintah yang lebih ketat terhadap pemilihan di desa, penempatan Babinsa di banyak desa, keterlibatan BULOG di dalam masalah desa melalui kebijaksanaan pembelian padi dan kredit dan KUD, usaha Golkar untuk mengangkat pengetua desa, "komersialisasi" pertanian, atau merosotnya orientasi subsistensi, dan lain-lain lagi. Namun, mengelirukan, untuk menyimpulkan bahwa hubungan yang sama tidak pernah ada dalam dasawarsa terdahulu, ada bukti yang jelas bahwa dulu

sudah ada, meskipun intensitas dan luasnya tidak terlalu. Dan tentu saja kini semuanya berlangsung jauh lebih cepat. Desa Jawa mungkin tidak pernah menjadi surga primitif terpencil, tertutup di dalam dirinya sendiri dan mencukupi kebutuhannya sendiri, desa yang aman dan tenteram sebagaimana dilukiskan oleh Belanda dan banyak mitologi Indonesia. Beberapa keluarga desa sejak berdasawarsa mengirim putera-puterinya ke kota untuk sekolah, mencari kerja di pemerintahan atau kerja yang lebih kasar atau kerja komersial, sehingga hubungan itu sudah lama ada. Sekarang mungkin menjadi jauh lebih penting, karena adanya kemungkinan mendekati penguasa dan sumber-sumber seperti kredit, informasi dan keterampilan sudah menjadi jauh lebih penting dari dahulu. Dari sini tingkat kesalingtergantungan yang diciptakan jauh lebih besar—dan dengan itu kesempatan untuk memberikan pengaruhnya kepada dua belah pihak. Tetapi pengaruh adalah suatu fenomena yang agak berbeda, menganalisa atau mengamati dari segi proyeksi *kekuasaan* oleh satu kelas atau stratum sosial lain lagi. Dan memang berbeda juga, dari persekutuan kepentingan kelas dan pandangan kelas, karena masih ada friksi yang sangat besar dan pertentangan laten antara keduanya.

Perubahan posisi dari para pejabat desa terhadap orang petani kaya darimana kebanyakan mereka berasal dan pegawai pemerintah dari kota-kota kecamatan dan kabupaten, pasti menciptakan sikap yang sungguh ambivalen baginya. Di bawah perundang-undangan pemerintah desa yang baru tahun 1979, kepala desa sudah dimasukkan ke dalam hirarki pemerintahan *pamong praja* sebagai bawahannya. Mereka sudah tidak lagi menjadi juru bicara desanya ketika berurusan dengan badan-badan pemerintah yang lebih tinggi tetapi menjadi perantara antara keduanya. Ini sama sekali tidak berarti perbaikan (kalau memang ada perbaikan itu) dari titik pandangannya. Berbagai program pemerintah kerap kali berarti gangguan terhadap masalah pedesaan, karena hal itu menciptakan tuntutan yang tidak disukai oleh desa atau yang dilawan oleh orang desa, meskipun kalau program tersebut juga memberikan sumberdaya atau pelayanan yang dibutuhkan. Semua ini membuat kehidupan

para lurah menjadi lebih keras. Karena dia masih menjadi seorang pejabat hasil pemilihan (dan pemilihan masih menjadi sesuatu proses yang bermakna pada tingkatan ini), setiap lurah yang terlalu dekat diidentifikasi dengan para penguasa di atas desa akan kehilangan pengaruh dan dukungan dari kalangan rakyatnya. Memang berguna, kadang-kadang berarti, bagi kepala desa dan pamong desa yang lain untuk memiliki hubungan baik dengan pegawai yang lebih tinggi agar berhasil. Tetapi jalan yang harus dilaluinya mengandung bahaya. Tak pelak lagi secara pribadi menguntungkan pejabat desa untuk membangun hubungan baik dengan pejabat di kota, hanya untuk mendapat jalan yang lebih gampang untuk mendapat sumber kredit, informasi dan pelayanan pemerintah yang berbagai macam. Namun untuk menarik kesimpulan dari sini, bahwa kepentingan politik dan sosial kedua strata ini bersatu dan tidak dapat terpisahkan berarti hanya mengambil pandangan satu sisi. Dugaan saya adalah bahwa kebanyakan pamong desa dan sebagian besar petani kaya di kalangan mana mereka tinggal masih menganggap pemerintah sebagai agen yang banyak bikin ulah, bahkan secara potensial menjadi ancaman. Mereka sangat mungkin akan menghukumnya bilamana mereka gagal melaksanakan instruksinya, karena seringkali tidak sempurna dipahaminya; jarang mereka melihatnya sebagai alat yang tanggap terhadap keinginannya, kepentingan atau tekannya. Namun asumsi kedua agaknya bersifat implisit, sekurang-kurangnya sampai tingkat tertentu, dalam teori bahwa kepentingan kelas kaum petani kaya dan kelas menengah kota kecil sedang dalam proses menyatu.

Masalah lain yang ada hubungannya dengan pentingnya arti kelas (atau politik) dalam perubahan sosial di desa harus ditambahkan. Sementara mungkin benar bahwa petani yang lebih kaya adalah orang-orang yang berada dalam posisi terbaik untuk mengeruk keuntungan dari kebijaksanaan pemerintah dalam hal beras (bisa mendapatkan kredit dan infrastruktur, penguasaan terhadap KUD dan lain-lain) dan seringkali mampu menyelenggarakan pelaksanaannya demi tujuannya sendiri, tidak dapat dikatakan bahwa hanya petani kaya saja mengambil keuntungan. Juga bukan tujuan kebijaksanaan peme-

rintah agar mereka saja yang boleh berbuat demikian. Kebijaksanaan pertanian Orde Baru bukan untuk menciptakan kelas *kulak* atau stratum "petani dominan". Retorika dan ideologinya justru berbicara sebaliknya. Pada tahun 1970-an berlangsung hubungan yang antagonistik antara penguasa dan petani, yang kaya maupun yang miskin, tentang rencana BIMAS memasukkan bibit unggul ke wilayah pedesaan.

Tidak banyak studi kasus tentang petani kaya dan cara-cara mereka mengerjakan tanahnya, menjalankan uangnya dan koneksi sosialnya. Masih banyak bahan yang kita perlukan sebelum kita mengambil generalisasi secara meyakinkan tentang masalah yang saya bahas di sini. Sering kita dengar tentang petani yang menjadi kaya baik karena kontak-kontaknya dengan pejabat yang lebih tinggi dari desa, atau karena mereka mampu menggunakan posisi resminya untuk merenggut kekayaan atau tanah. Tetapi jarang kita dengar tentang orang Indonesia yang berwibawa secara politis hanya karena mereka adalah petani kaya, kecuali mungkin di dalam lingkaran yang kuat Islamnya. Tetapi Islam hampir tidak bisa digolongkan sebagai "basis strategis buat dukungan politik negara Orde Baru" seperti dikatakan Robison: mereka, justru, penantang paling keras terhadap pemerintah Orde Baru.

Kesimpulan

Kalau sekarang kita kembali kepada pertanyaan: "Mengapa kelas burjuasi pribumi yang kuat, berdiri sendiri, tidak mampu berkembang di Indonesia selama abad dua puluh, meskipun adanya ekspansi ekonomi besar-besaran sebelum tahun 1930 dan sejak 1967?", maka berbagai faktor dengan gampang dapat ditentukan—peranan menentukan dari pihak Belanda, peranan Cina dan modal asing lainnya di dalam ekonomi yang sangat kuat orientasi ekspornya adalah yang paling jelas dan mungkin masih menjadi yang paling penting. Tetapi ada hal yang sering diabaikan yang perlu disinggung di sini. Sejak kemerdekaan, kebanyakan pengusaha Indonesia aktif dalam kegiatan bisnis yang cepat membawa hasil seperti impor-ekspor atau perdagangan eceran, di mana resiko ekonomi biasanya kecil (meskipun tidak

selalu, karena seringkali ada unsur spekulatif, juga) dan keuntungan sering sangat tinggi. Jarang mereka menanam sejumlah besar modalnya dalam pembiayaan jangka panjang seperti perkebunan, pabrik, jenis perusahaan yang kini lebih khas ekonomi kapitalis maju. Bahkan pembiayaan sawah dalam jumlah besar-besaran tidak ada sebagaimana sudah kita lihat. Tidak ada yang tidak rasional dalam perilaku ekonomi ini. Dalam suatu lingkungan politik dan pembuatan kebijaksanaan, yang tidak pasti, investasi jangka panjang bisa menjadi suatu rumusan yang sangat meragukan. Tetapi para pemimpin bisnis di Indonesia sejak kemerdekaan tidak pernah mempunyai pengaruh politik yang diperlukan untuk menjamin lingkungan yang menguntungkan dalam jangka panjang. Tragedi sebenarnya bagi bangsa tersebut adalah bahwa kepentingan jangka pendek pengusaha di dalam suatu situasi seperti ini tidak sesuai dengan kepentingan jangka panjang ekonomi nasional dalam arti luas. Kalau itu tidak terjadi, kelemahan dasar dalam masyarakat politik tidak akan sembuh. Mungkin ada beberapa bukti tentang pergeseran ke arah itu sudah mulai tahun 1970-an, tetapi sangat kecil, itu pun kalau ada.

Melihat hal yang sama dari sisi sebaliknya, dari titik pandangan sektor ekonomi yang membutuhkan investasi jangka panjang dan di mana kemampuan ekspor Indonesia tergantung, industri minyak dan sektor non-minyak di mana Indonesia mempunyai keuntungan komparatif terhadap negara-negara lain, seperti tanaman keras (dan tidak terlalu kuat tetapi bisa juga beras), agaknya pemilik dan penguasa sumber itu tidak mempunyai pengaruh terlalu langsung terhadap kehidupan politik atau kemampuan menentukan kebijaksanaan pemerintah dalam arti luas (dan seringkali bahkan tidak dalam masalah yang sangat berhubungan dengan kemakmuran ekonominya). Para manajer perkebunan tidak ada yang tampil menjadi menteri pertanian atau perdagangan: Hubungan Pertamina dan Menteri Pertambangan seringkali sangat buruk dan industri minyak lebih menjadi babu pemerintah dan bukan tuan dalam hubungan dengan kebijaksanaan ekonomi (meskipun harus diakui, babu yang keras kepala dan tidak gampang dikontrol

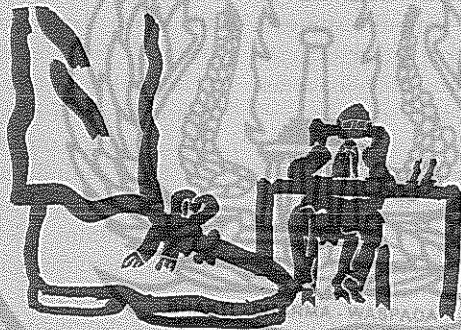
dalam masa Ibnu Sutowo: tetapi akhirnya sangat patuh.

Hal penting dalam penalaran saya di sini adalah pola pengambilan keputusan ekonomi di Indonesia dan interaksi antara pemegang kekuasaan dan pemilik dan penguasa harta dalam bidang yang lebih luas. Hubungan itu sangat berbeda dari apa yang biasanya kita terima begitu saja di dalam masyarakat kapitalis murni. Struktur kelompok kepentingan ekonomi tidak jelas dan secara nisbi tidak ada pengaruh politik. Namun, alasan untuk ini lebih berada di dalam bidang politik, daripada ekonomi. Legitimasinya dicurigai, terutama di bawah ekonomi terpimpin tetapi juga di bawah Orde Baru. Saya kira tidak cukup dicari alasannya semata-mata pada hubungan struktural antara kelompok "borjuis" ini dan itu, atau dengan negara, karena masalahnya jauh lebih dalam dari itu. Bagaimanapun juga, beberapa kepentingan ekonomi ini sangat penting bagi negara, bilamana diukur secara kuantitatif murni (tetapi secara politik lemah dan rawan karena berbagai alasan historis). Saya mau menunjukkan lemahnya kelompok kepentingan bisa dicarikan alasannya lebih pada kecurigaan fundamental lembaga-lembaga pusat dan masih berkuasanya ideologi kapitalisme di dalam masyarakat Indonesia. Kepentingan nasional dan kepentingan umum pada umumnya dipandang sebagai sesuatu yang di atas dan terpisah dari kepentingan pribadi setiap individu. Jelas ekonomi Indonesia bersifat "kapitalis" dalam banyak hal untuk suatu jangka waktu yang tidak singkat, sebagaimana dikatakan Robison, tetapi sama sekali tidak seluruhnya atau semata-mata demikian, bahkan sekarang ini. Tidak ada kegairahan untuk memandang persaingan bebas dalam ekonomi pasar sebagai suatu kebajikan dan yang ada hanya komitmen rapuh dalam beberapa golongan terbatas kelas menengah tentang apa artinya paham *rule of law* atau kekudusan dan tak terlanggarnya milik pribadi dalam hubungan dengan kehidupan ekonomi. Sebaliknya, ideologi ekonomi kebanyakan masih dikuasai oleh paham bahwa konflik kepentingan ekonomi harus diatur oleh pemerintah, seolah-olah penguasa itu sumber semua kebijakan dan keadilan. (Tentu saja, hal itu sangat sesuai dengan paham Jawa

tentang peran seorang penguasa). Monopoli tidak membangkitkan amarah orang Indonesia sebagaimana orang Amerika, apalagi kalau monopoli berada di tangan pemerintah.

Ada banyak segi lainnya di mana sistem nilai yang ada atau ideologi berbagai masyarakat Indonesia, baik yang tradisional dan peralihan yang moderen, sangat besar bedanya dari nilai-nilai dan ideologi pada umumnya ada di dalam masyarakat kapitalis Barat. Tidak atau sedikit sekali komitmen kepada apa yang dianggap kebajikan pluralisme politik atau hak untuk berbeda pendapat atau oposisi. Kekuasaan harus dipusatkan di tangan penguasa, jangan disebar, demikian menurut pemikiran Jawa tradisional. Kesatuan lebih menjadi soal dari keanekaan. Tidak cukup ruangan di sini untuk

membahas semua tali temali tentang perbedaan itu di sini. Saya hanya mau mengatakan bahwa semua itu sangat relevan dengan diterimanya sistem pemerintahan yang pada hakekatnya patrimonial sifatnya dan bertentangan dengan penerimaan sistem pemerintahan kapitalis borjuis. Karena itu hampir tidak dapat kita harapkan, bahwa akan muncul "burjuasi" yang kuat di Indonesia segaris dengan Eropa Barat (atau Jepang atau negara-negara industri muda neokonfusian), bahkan seandainya tantangan terhadap pertumbuhannya seperti misalnya perbedaan etnis antara orang Indonesia dan Cina, tidak ada. Ini tidak berarti bahwa beberapa bentuk campuran tidak akan berkembang; tetapi pertumbuhannya akan lamban dan kekuatannya sangat terbatas, dalam suatu jangka waktu yang tidak singkat.



Setelah lama ditunggu kini terbit kembali !

Pemuda dan Perubahan Sosial

editor *Taufik Abdullah*

Apa dan bagaimana hubungan generasi muda dan perubahan sosial di Indonesia? Pemuda menciptakan perubahan atau diciptakan perubahan?

Orang membicarakan hubungan antar generasi tapi juga konflik generasi. Bagaimana soalnya? Sembilan cendekia Indonesia membahas permasalahan umum generasi muda, kelompok terpilih "elite" dan penyebaran pemuda di desa dan kota. 155 hal. Rp. 1.750,—

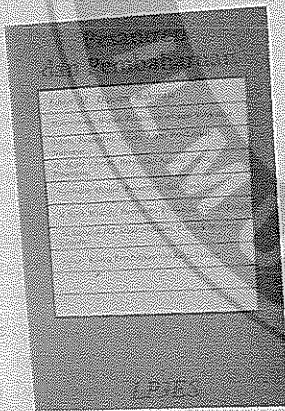


Pesantren dan Pembaharuan

editor *M. Dawan Rahardjo*

Bagaimana sebenarnya wajah pesantren itu? Konon, pesantren mewarnai kehidupan masyarakat sekitar yang terus berubah, tapi bagai tak tersentuh pembaharuan. Benarkah?

Delapan cendekiawan Islam, antara lain Nur-cholish Madjid, Abdurrahman Wahid, Habib Chirzin — mengupas berbagai aspek lembaga pendidikan tradisional Islam ini di tengah arus modernisasi. 200 hal. Rp. 1.750,—



Dapatkan di toko buku Anda. Pesanan langsung disertai pembayaran tambah ongkos kirim 10% (min. Rp. 750,—) ke :

LP3ES

Jl. S. Parman 81, Slipi
Jakarta Barat. Telp. 597211